

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI DESA DONGKALAEA
KECAMATAN WAWONII UTARA
KABUPATEN KONAWE KEPUALAUAN**

ISMIYANA

Dr. Gunawan, M.Si

Drs. H. Mustakim, M.Si

Ismiyana@gmail.com

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS HALU OLEO

KENDARI

2018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Dongkalaea Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jumlah informan penelitian sebanyak tujuh orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa belum berjalan dengan efektif hal ini disebabkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah dan masyarakat hanya sebatas menghadiri tapi tidak aktif menyampaikan gagasan-gagasan dan saran-sarannya. Selain itu dalam suatu program pembangunan sudah ditentukan waktu pengerjaannya atau pencapaiannya tapi masih ada program yang tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelumnya.

Kata kunci: Efektivitas Dan Musrenbang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi dimana dalam konteks ini, organisasi tersebut adalah Negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengubah atau menciptakan perubahan-perubahan penting pada struktur sosial, sikap masyarakat, hingga peran dan sikap pemerintah.

Pembangunan merupakan proses yang diawali dengan perencanaan. Keberhasilan pembangunan disuatu wilayah pemerintahan akan sangat ditentukan oleh bagaimana kualitas perencanaan pembangunannya. Perencanaan akan menunjukkan arah yang jelas tentang apa yang menjadi kebutuhan warga dalam periode tertentu. Dengan perencanaan, semua kegiatan pembangunan dalam berbagai sektor memiliki target yang jelas dan terukur. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan proses perencanaan merupakan hal penting untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dwidjowijoto (2003:67) mengemukakan bahwa perencanaan yang baik dapat diidentikkan dengan sebuah perjalanan yang sudah melewati separuh jalan, karena sisanya tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Sepanjang pelaksanaan konsisten dan pengendaliannya efektif maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menunggu waktu untuk sampai ketujuan.

Wrihatnolo dan Nugroho (2011:40) mengatakan bahwa perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Dongkalaea Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Dongkalaea Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, masukan-masukan bagi aparat pemerintah di Desa Dongkalaea Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan, serta memperbaiki proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) lebih baik lagi, sehingga lebih memperhatikan nilai-nilai keefektifan.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan pengetahuan dalam ilmu pemerintahan, serta bagi aparatur pemerintah

daerah dapat menerapkan teori perencanaan pembangunan dalam “*bottom up planning*” khususnya dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Dongkalaea Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Efektivitas

Miller dalam Tangkilisan (2005:138) mengemukakan bahwa “efektivitas adalah tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya”.Efektivitas ini menurut Miller berbeda dengan efesiensi.Efesiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan.

Sumaryadi dalam Houdson (2015:3)“efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain”.

B. Konsep perencanaan Pembangunan

Herujito (2001:84) mengemukakan bahwa “perencanaan adalah keputusan terhadap apa yang akan dilakukan dikemudian hari”.Perencanaan berisi perumusan dari tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan.

Dwidjowijoto (2003:67) mengemukakan bahwa “perencanaan yang baik dapat diidentikkan dengan sebuah perjalanan yang sudah melewati separuh jalan, karena sisanya tinggal melaksanakan dan mengendalikan”.Sepanjang pelaksanaan konsisten dan pengendaliannya efektif maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menunggu waktu untuk sampai ketujuan.

C. Konsep perencanaan partisipatif

Theodorson dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2012:81) menyatakan bahwa “partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri”. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain.

Dr. Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti Dwiningrum (2011:50) “partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan”.Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

D. Konsep Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dijelaskan pada pasal 1 ayat 21 yakni musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah, tujuan diadakannya musrenbang yakni melibatkan peran serta masyarakat untuk mengetahui rencana pembangunan yang akan dilakukan

sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 4 huruf d menjelaskan diantara tujuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Fikri (2015:65) Musrenbang menjadi ruang publik yang berguna untuk menampung aspirasi masyarakat serta keluhan masyarakat terkait pembangunan kedepan mulai dari mengenali masalah, kebutuhan, tantangan eksternal, potensi yang ada serta penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Musrenbang dilaksanakan di setiap tingkatan, mulai tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat nasional.

E. Kerangka Pikir

Menurut Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa memuat definisi tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 yang berbunyi: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (Musrenbang-Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan. Oleh karena itu musrenbang desa harus benar-benar diselenggarakan secara efektif.

Efektifitas Musyawarah Pembangunan Desa seperti yang dikemukakan oleh Ludiro dkk (2016:77) dalam Modul Pelatihan Praturgas Pendamping Desa Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan desa, selanjutnya demokrasi dimana setiap masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat atau argument terkait pembahasan, selanjutnya transparan dimana masyarakat berhak memperoleh informasi terkait musyawarah perencanaan pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dongkalaea Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan. Penentuan lokasi ini didasarkan pertimbangan dasar tentang adanya masalah yang layak diteliti. Berdasarkan kajian awal penulis, ditemukan bahwa pelaksanaan musrenbang di Desa Dongkalaea Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan masih belum efektif. Ini merupakan salah satu pertimbangan penulis dalam memilih lokasi.

B. Informan penelitian

Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Anggota BPD, 2 orang Aparat Desa, dan 3 orang Masyarakat setempat. Penetapan informan penelitian ini dilakukan berdasarkan teknik sengaja (*purposive sampling*), dengan pertimbangan bahwa ketujuh orang tersebut memiliki cukup pengetahuan terhadap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

C. Jenis Dan Sumber Data

jenis dan sumber data yang diperoleh dalam mendukung tulisan ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari berbagai sumber yakni data yang diperoleh dari subyek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari narasumber secara langsung melalui wawancara.
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berkenaan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui pemanfaatan sumber data yang tersedia seperti dokumen, arsip, dan buku pedoman serta literatur yang terkait dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Study*), yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai informasi dan data melalui tulisan-tulisan ilmiah, seperti buku-buku, jurnal, dan beberapa literatur lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu metode pengumpulan data secara langsung pada obyek atau lokasi penelitian. Untuk memperoleh data dilapangan digunakan teknik-teknik sebagai berikut:
 1. Wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara terstruktur kepada informan terpilih.
 2. Dokumentasi yaitu menelaah dan mempelajari berbagai laporan pelaksanaan tertulis yang relevan dengan penelitian ini.
 3. Pengamatan lapangan (*observasi*), guna memperoleh data dan informasi melalui pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian.

E. Analisis Data

Data atau informasi yang diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memberikan gambaran informasi masalah secara sistematis, jelas dan mendalam untuk mendapatkan data kualitatif yang baru. Hasil dari gambaran informasi akan diinterpretasikan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan dukungan teori yang berkaitan dengan objek yang diteliti untuk menarik kesimpulan.

- a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data baik dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. Penyajian data yang dimaksudkan untuk menghimpun, menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data.
- c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

F. Definisi Konsep

Adapun konsep operasional sebagai acuan dalam penelitian dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Efektifitas Musyawarah Pembangunan Desa
 1. Partisipasi
Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat Desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis Desa.
 2. Demokratis
Setiap masyarakat berhak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan Musyawarah Desa.
 3. Transparan
Transparan berarti tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat Desa, kemudahan dalam mengakses informasi, memberikan informasi secara benar dan baik dalam hal materi permusyawaratan.
- b. Perencanaan yang baik dan efektif memiliki beberapa unsur, yaitu:
 1. Permasalahan
Permasalahan merupakan suatu kendala atau persoalan yang harus diselesaikan, dengan kata lain masalah adalah suatu kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik. Dalam proses perencanaan perumusan masalah harus sesuai dengan apa yang terjadi didesa.
 2. Tujuan
Tujuan yang dimaksud adalah gambaran tentang apa yang ingin dicapai. Dalam proses perencanaan harus jelas tujuan yang ingin dicapai oleh pelaksana dan diharapkan harus sesuai dengan skala prioritas kebutuhan warga.
 3. Penjabaran
Penjabaran yang dimaksud disini adalah dalam proses perencanaan diharapkan dapat menguraikan program-program atau kegiatan secara rinci dan konkrit.
 4. Jangka waktu
Jangka waktu yang dimaksud adalah rentang waktu yang dibutuhkan. Dalam proses perencanaan pembangunan perlu ada jangka waktu pencapaian atas suatu program atau usulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa

Gambaran umum wilayah yaitu menggambarkan lokasi penelitian yaitu sebagai berikut :

a. Sejarah Singkat Desa

Pada masa pemerintah distrik desa ini adalah tempat kedudukan kepala kampung dan tinggal ditengah-tengah kampung. Jadi Desa Dongkalaea ini sebelumnya menjadi RT kemudian menjadi RK. Setelah Desa Waworope di

bagi dua Desa maka Dongkalaea menjadi dusun paling ujung dari Desa Waworope, Desa Dongkalaea adalah merupakan bagian dari pemekaran Desa Waworope, dimana dulunya Desa Waworope merupakan Desa yang tertua di Kecamatan Wawonii dan Desa ini telah dihuni penduduk asli orang Wawonii.

Pada tahun 1998 mekar dari Desa Waworope menjadi Desa Dongkalaea, dimana arti dari Dongkalaea ini diumpamakan sebuah pohon yang besar dan rimbun dan berbuah banyak yang menandakan bersatu bulat tekad dalam membangun Desa yang kecil ini. Desa Dongkalaea ini terdiri dari tiga dusun yaitu: Dusun I, Dusun II, dan Dusun III

b. Keadaan Geografis

Secara geografis Desa Dongkalaea terletak pada dataran rendah dengan ketinggian 75 m dari permukaan laut, yang dihuni sebagian besar suku Wawonii, dan suku lain yang telah lama tinggal dan menetap, dengan batas-batas Desa Dongkalaea yakni:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut Banda
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Wawoea
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Waworope
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Labeau.

c. Keadaan Penduduk

1. Jumlah penduduk menurut Dusun dan Jenis kelamin di Desa Dongkalaea
Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk Desa Dongkalaea tercatat 91 Kepala Keluarga atau 325 jiwa yang tersebar di tiga Dusun, seperti pada tabel berikut :

Dari data pada Tabel 1. Tercatat jumlah total penduduk Desa Dongkalaea sebesar 325 jiwa, terdiri dari laki-laki 180 jiwa dan perempuan 145 jiwa dan terdiri dari tiga dusun, dengan 91 kepala keluarga. Dimana dusun I berjumlah 106 jiwa dengan total 30 kepala keluarga, dan Dusun II berjumlah 133 jiwa dimana total kepala keluarganya mencapai 32 kepala keluarga, selanjutnya Dusun III dimana berjumlah 86 jiwa dengan total 29 kepala keluarga. Dari ketiga Dusun tersebut Dusun II yang paling banyak jumlah penduduknya dan dengan jumlah Kepala keluarga terbanyak jikadibandingkandengan Dusun I dan Dusun III.

2. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan
Berikut jumlah penduduk Desa Dongkalaea yang ditinjau dari tingkat pendidikan

Berdasarkan data pada Tabel 2. Diatas menunjukkan bahwa pada umumnya tingkat pendidikan penduduk yang berada di Desa Dongkalaea relatif masih kurang memadai dimana terdapat 174 warga yang memiliki tingkat pendidikan antara tidak tamat SD sampai Tamat SLTP.

3. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian
Mata pencaharian merupakan salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jenis mata pencaharian suatu wilayah tergantung dari potensi alam, letas geografis, dan tingkat pendidikan serta keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing warga. Adapun komposisi mata pencaharian penduduk Desa Dongkalaea adalah sebagai berikut

Berdasarkan Tabel 3. Diatas menjelaskan bahwa jumlah kelapakeluarga menurut mata pencaharian seperti yang terdapat pada tabel diatas, memberikan gambaran tentang jumlah kepala keluarga berdasarkan mata pencaharian mereka. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa kepala keluarga yang bermata pencaharian sebagai petani menduduki jumlah terbesar yaitu 68 kepala keluarga jika dibandingkan dengan kepala keluarga yang bermata pencaharian sebagai nelayan, PNS, Pedagang, dan Pengrajin.

d. Organisasi Pemerintahan Desa Dongkalaea

Berikut ini susunan pemerintahan Desa Dongkalaea adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa : Muhamad Arif
- Sekretaris Desa : Lukman
- Kaur Pemerintahan : Ruslan
- Kaur Kesejahteraan : Sukriman
- Kaur Pelayanan : Siti Saripa
- Kaur Tata Usaha Dan Umum : Yulpikar
- Kaur Keuangan : Megawati
- Kaur Perencanaan : Aswad
- Kepala Dusun I : Arman. N
- Kepala Dusun II : Nuriati
- Kepala Dusun III : Sahal

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Dongkalaea Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan

Dalam proses pembangunan perencanaan merupakan hal yang penting. Dengan perencanaan, semua kegiatan pembangunan dalam berbagai sektor memiliki target yang jelas dan terukur. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan proses perencanaan merupakan hal penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan desa bukan hanya melibatkan pihak pemerintah desa melainkan melibatkan masyarakat setempat untuk bersama membicarakan pembangunan desa. Jadi dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di perlukan partisipasi masyarakat, dan dalam proses pelaksanaannya harus demokratis dan transparan.

b. Perencanaan pembangunan

Riyadi dan Bratakusumah (2004: 6) mengemukakan bahwa “perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan”. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun

dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mampu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta dilapangan.

Perencanaan pembangunan diartikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada. Ketika menyusun suatu perencanaan pembangunan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Desa Dongkalaea Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa belum sepenuhnya efektif dilaksanakan karena masih ada beberapa prinsip yang belum sepenuhnya dijalankan yakni mulai dari partisipasi masyarakat yang masih kurang hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat masih kurang peduli terhadap pembangunan desa dan juga masih ada masyarakat yang kurang pengetahuannya terkait pentingnya musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, agar pelaksanaan perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa Dongkalaea Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan berjalan efektif dimasa mendatang dan lebih berkualitas lagi baik dari segi proses maupun hasil , maka peneliti menyarankan kepada pihak pemerintah agar melakukan sosialisasi terkait pentingnya musyawarah perencanaan pembagunan dan juga pemerintah desa dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa agar ciptakan suasana yang tidak tegang dan tetap kondusif agar masyarakat dapat menyampaikan gagasan dan saran-sarannya tanpa takut pemerintah desa akan mengabaikan saran-saran meraka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan daerah Partisipatif*. Solo : Pondok Edukatif.
- Arsyad, Lincolin. 2002. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPF.
- Atmosoeparto, Kisdarto. 2000. *Produktivitas: Aktualisasi Budaya Perusahaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2003. *Reinventing Pembangunan*.Elex Media Komputindo.
- Fikri,Ashar. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kel.Pegirian Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 3 No 2

- Hamzens, Wildani. 2005. *Perencanaan Di Indonesia 25 Tahun Mendatang*. Bogor: Labdawara.
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- Houdson, Marganda, Napitupulu. 2015. Efektifitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Senapan Kota Pekanbaru tahun 2013. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 2 No.2
- Koiruddin.2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia*. Malang: Averroes Press.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugroho dan Wrihatnolo. 2011. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Elex Media Coputindo: Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sjafirzal. 2009. *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Baduose Media.
- Sunarto, 2016. *Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Dikecamatan Gunungpati Kota Semarang*. *Jurnal Stie Semarang*. Vol 8 No 2
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press.
- Tangkilisan, Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Todaro, Micheal, P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato.2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV ALFABETA.
- Tresiana, Novita. 2003. Telaah PP Nomor 8/2003; Efektivitas-Efisiensi Organisasi Publik Versus Optimasi Pelayanan Publik